



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
LAPORAN KINERJA

KANTOR CAMAT PANTAI CERMIN

TAHUN 2019

SURIAN, 31 DESEMBER 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2019 ini dapat berjalan dengan lancar. Laporan Kinerja Kecamatan Pantai Cermin disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja, sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran dan tujuan maupun dalam mencapai cita-cita Kecamatan Pantai Cermin.

Laporan Kinerja Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2019 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pantai Cermin.

Tujuan dari Laporan Kinerja Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan Kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) dalam menilai capaian kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Atas kerjasama dan kerja keras semua anggota tim dalam penyusunan Laporan Kinerja ini disampaikan terima kasih.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2019 ini, dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan bahan evaluasi serta perencanaan program pengawasan yang akan datang.

Surian, Februari 2019

CAMAT PANTAI CERMIN

CHRISMON DARMA,S.IP

NIP.198803302007011001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pantai Cermin tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penyusunan LAKIP Kecamatan Pantai Cermin tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap yang telah dilakukan selama tahun 2019. Dalam upaya merealisasikan Good governance, Kecamatan Pantai Cermin telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2016-2021.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Untuk merealisasikan amanat peraturan perundang-undangan tersebut Kecamatan Pantai Cermin telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Tahun 2019. Topografi Kecamatan Pantai Cermin merupakan wilayah berbukit dengan rata-rata kemiringan 20 – 30 derajat dan lembah sebelah Barat dan Timur semak belukar dan hutan lebat, dengan suhu rata-rata 25 derajat celcius . Apabila berdiri dari puncak gunung lalu memandang kearah barat maka akan terlihat suatu daerah yaitu Banda Sapuluah dengan Pantai Pasir yang mengkilat, bercahaya putih bening bagaikan cermin, nama Kecamatan Pantai Cermin asal mulanya dari nama gunung itu yang terletak disebelah Barat Nagari Surian dan Lolo .

Secara geografis Kecamatan Pantai Cermin terletak di daerah pegunungan dengan mayoritas penduduk bekerja di bidang pertanian. Untuk letak geografis Kecamatan Pantai Cermin itu sendiri adalah :

1. Letak Geografis :
2. Batas Daerah :

Utara	:	Kec. Lembah Gumanti
Selatan	:	Kab. Solok Selatan
Barat	:	Kec. Pesisir Selatan
Timur	:	Kec. Hiliran Gumanti
3. Luas Daerah : 36.600 Ha
4. Curah Hujan : 360 mm/tahun
5. Ketinggian Dari Permukaan Laut : 1.026 meter

Kecamatan Pantai Cermin memiliki 2 (dua) nagari yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Jorong. Nama-nama Nagari dan Jorong Tersebut adalah :

No.	Nagari	Nama Jorong
1.	Nagari Surian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Balantai 2. Suliti 3. Gaduang 4. Tampak 5. Kulemban 6. Dalam Koto 7. Pasa Surian 8. Balakang Pasa 9. Ladang Padi 10. Tambang 11. Kayu Manang 12. Koto Tinggi 13. Ulu Sungai Indaruang Surian 14. Lubuak Rasam
2.	Nagari Lolo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ulu Sungai Indaruang Lolo 2. Sungai Indaruang 3. Aia Janiah 4. Muaro Sungai Indaruang 5. Aia Daliak 6. Pisau Hilang 7. Ulu Pisau Hilang 8. Banto Mudiak 9. Banto Hilia 10. Pintu Rimbo 11. Pasa Lolo 12. Ulu Lolo 13. Lubuak Batu Kuniang 14. Muaro Pisau Hilang

Rasio Kepadatan Penduduk di Kecamatan Pantai Cermin dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah adalah sebagai berikut :

No	Nagari	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Surian		16.952	3.953
2.	Lolo		6.499	1.817

Target kinerja yang harus dicapai Kantor Camat Pantai Cermin tahun 2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Rensra) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja masing-masing unit satuan kerja yang ada di Kecamatan Pantai Cermin.

1.1.1 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2019 adalah:

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan,
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

1.3.1. Identifikasi dan Analisis Kondisi

1) Identifikasi dan Analisis Kekuatan

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kecamatan Pantai Cermin Kab. Solok dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah:

- a. Struktur Organisasi Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok berdasarkan pada, Adapun mengenai kedudukan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah :

Kedudukan :

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- b. Susunan kerja dikecamatan Pantai Cermin yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (team Work);
- c. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi gedung, ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.
- d. Hubungan dinamis dalam/ dengan masing-masing SKPD dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif atas-bawah (top Down) dan bawah-atas (Bottom up).

2) Identifikasi Dan Analisis Kelemahan

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan diatas, ternyata Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut:

- a. Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati;
- b. Sistem informasi yang dimiliki masih kurang, tidak sebanding dengan kebutuhan unit kerja.

Peluang (Opportunities)

- a. Dengan adanya otonomi daerah yang luas dan nyata, Kecamatan Pantai Cermin memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk kepentingan masyarakat.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan sehingga memacu Kecamatan untuk lebih akuntabel dan transparan.
- c. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang pesat merupakan aspek percepatan peningkatan kinerja Kecamatan Pantai Cermin

Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.2.1. Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor : 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan BAB III Tugas dan Fungsi Pasal 4 ayat 1, Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten di tingkat kecamatan / Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas yang tersebut diatas, Kecamatan diberi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Solok Nomor : 25 Tahun 2016 tentang Kewenangan Bupati Yang Dilimpahkan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, meliputi:

1. Kewenangan Perizinan;
2. Kewenangan Rekomendasi;
3. Kewenangan Pembinaan;
4. Kewenangan Pengawasan;
5. Kewenangan Fasilitasi;
6. Kewenangan Pemerintahan Umum.

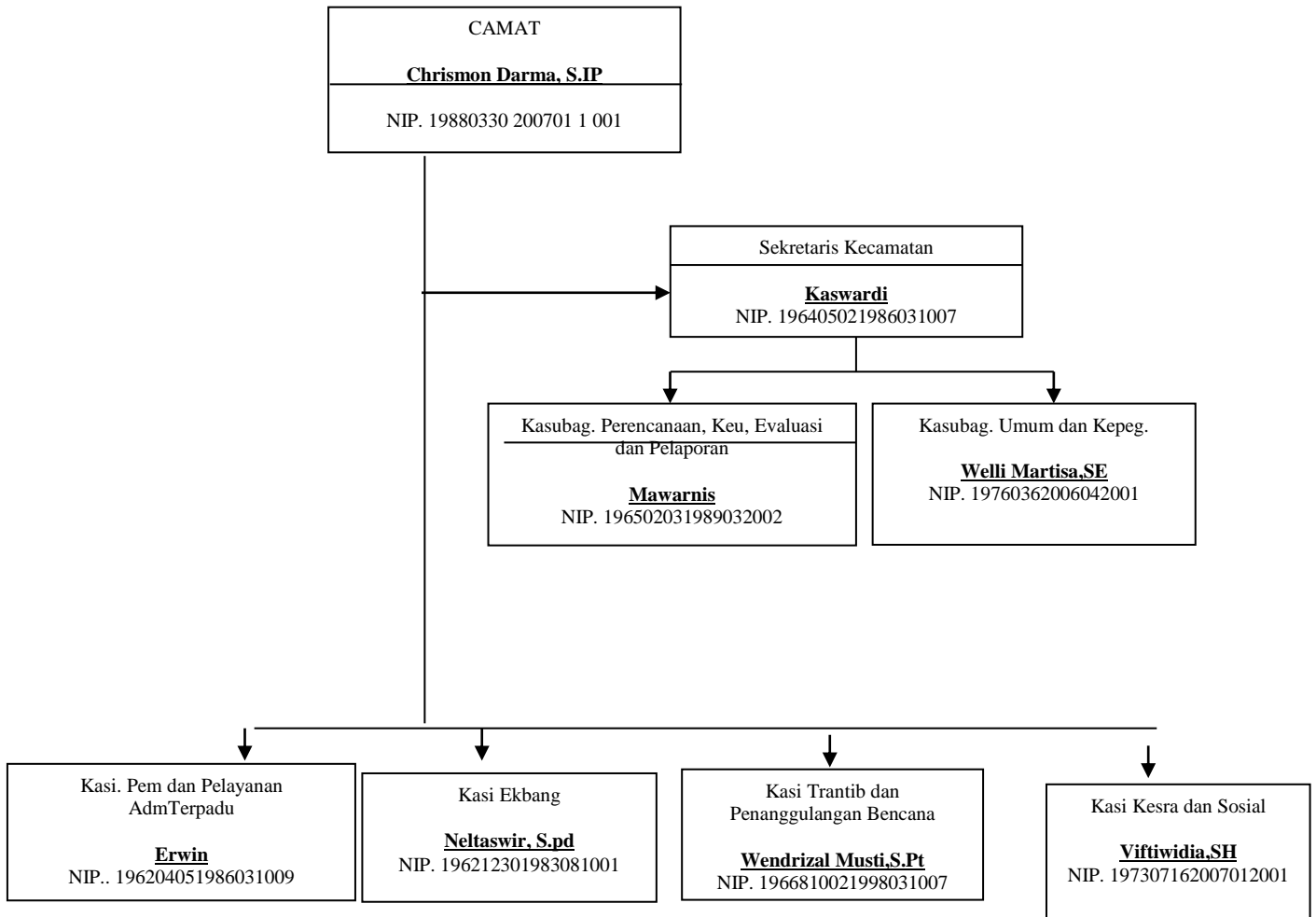
I.2.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kecamatan, maka struktur organisasi Kantor Camat Pantai Cermin dapat dilihat dari bagan berikut ini :

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2019



I.2.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan Pantai Cermin, sebagai berikut :

- a. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :
 1. Camat / Eselon III A : 1 orang
 2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B : 1 orang
 3. Kepala Seksi / Eselon IV A : 4 orang
 4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B : 2 orang
 5. Staf Pelaksana : 3 orang
- b. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :
 1. Golongan IV : 2 orang
 2. Golongan III : 8 orang
 3. Golongan II : 1 orang
- c. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :
 1. Pendidikan S 2 : - orang
 2. Sarjana / S 1 : 7 orang
 3. Diploma 3 : 0 orang
 4. SLTA/ sederajat : 4 orang

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Beberapa informasi potensial lainnya di Kecamatan Pantai Cermin yang biasa menjadi peluang dalam peningkatan pembangunan daerah, diantaranya :

- a. Hubungan yang baik dan harmonis antara aparat Kecamatan Pantai Cermin dengan masyarakat memudahkan dalam konsultasi pelaksanaan kegiatan.
- b. Kecamatan Pantai Cermin merupakan daerah pariwisata, agrowisata dan ekowisata, sehingga dengan pemanfaatan yang optimal bisa memberikan kontribusi pada daerah.
- c. Aktifitas penduduk yang banyak bergelut dalam bidang pertanian, memberikan peluang Kecamatan Pantai Cermin untuk menjadi daerah sentral hasil pertanian.
- d. Kecamatan Pantai Cermin yang memiliki banyak Danau, diantaranya Danau Talang, Danau Diatas dan Danau Dibawah menyuguhkan pemandangan yang indah.

I.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Pantai Cermin selama tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2019, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- Lampiran**
- 1) Perjanjian Kinerja
 - 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Solok, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Solok. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA”, SYARA’ BASANDI KITABULLAH”**,

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih

Sesuai dengan peran Pantai Cermin Tahun 2016 – 2021 tertuang pada Misi Kelima Kabupaten Solok yaitu Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan tujuan : untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) berbasis Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Madani, sasaran yang akan dicapai Kecamatan Pantai Cermin adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa pernyataan tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan tujuan tersebut Kecamatan Pantai Cermin mengetahui apa yang harus dilaksanakan kedepannya.

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari Kecamatan Pantai Cermin yang ditetapkan adalah Menyelenggarakan secara optimal tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta kemandirian Pemerintah Nagari menuju kesejahteraan masyarakat

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan

berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Pantai Cermin dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.1
Kesesuaiaan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
2.	Meningkatkan tertib administrasi Nagari	Meningkatnya kepatuhan Nagari dalam penataan administrasi
3.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu dituangkan dalam program kerja Kecamatan Pantai Cermin, sehingga dapat dilihat kesesuaian antara sasaran dan program untuk mencapai sasaran tersebut.

Tabel 2.2
SASARAN DAN PROGRAM

No	Sasaran Strategis	Program
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari
2	Meningkatnya kepatuhan Nagari dalam penataan administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari
3	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Kecamatan Pantai Cermin dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Pengukuran
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan ditindaklanjuti}}{\text{Jml pengaduan masy}} \times 100\%$
		Persentase gangguan Trantibmas yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml gangguan yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah gangguan yang ada}} \times 100\%$
2	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan administrasi	Persentase Nagari dengan pelaporan ADN tepat waktu	$\frac{\text{Jml nagari yg melaporkan ADN}}{\text{Jumlah nagari yang ada}} \times 100\%$
		Persentase Nagari yang menetapkan APB tepat waktu	$\frac{\text{Jml nagari yg menetapkan tpt wkt}}{\text{Jumlah nagari yang ada}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase usulan Musrembang Kecamatan yang tertampung dalam Dokumen RKPD	$\frac{\text{Jml usulan yg tertampung di RKPD}}{\text{Jumlah usulan musrenbang}} \times 100\%$
		Persentase capaian PAD	$\frac{\text{Realisasi capaian PAD}}{\text{Jml Target PAD}} \times 100\%$

2.3. RENCANA KINERJA 2019

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok selama tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Rencana Kinerja Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
RENCANA KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	
		URAIAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 3. Persentase Gangguan Trantibmas yang ditindaklanjuti	3,5 100% 100%
2.	Meningkatnya Kepatuhan Nagari dalam Penataan administrasi	1. Persentase Nagari dengan pelaporan ADN tepat Waktu 2. Persentase Nagari yang Menetapkan APB tepat waktu	100% 100%
3.	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Tertampung dalam Dokumen RKPD 2. Persentase Capaian PAD	100% 100%

2.4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Table 2.5

**PENETAPAN KINERJA KECAMATAN PANTAI CERMIN
TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	3,14 100%	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Alat tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 11. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 14. Peningkatan Pengembangan	300.000 15.230.140 1.500.000 9.830.000 3.900.000 2.000.000 14.000.000 16.800.000 25.000.000 41.000.000 29.900.000 49.220.000 2.500.000 200.000	

				Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sistem Palporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
		3. Persentase gangguan trantibmas yang ditindaklanjuti	100%	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	7.000.000	
2	Meningkatnya kepatuhan Nagari dalam penataan administrasi	1. Persentase Nagari dengan Pelaporan ADN tepat waktu 2. Persentase Nagari yang menetapkan APB tepat waktu nagari	100% 100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masy Pedesaan dan Nagari Program Peningkatan Keberdayaan Masy Pedesaan dan Nagari	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masy pedesaan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan TP-PKK	212.750.000	
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam Dokumen RKPD	40%	1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	6.500.000 5.000.000	
		2. Persentase capaian PAD	40%	- Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	-Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	1.400.000-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok selaku perangkat daerah, melaksanakan kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Kinerja. Laporan tersebut diatas memberikan Gambaran Mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2019.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Impres No. 7 tahun 1999 dan keputusan Kepala LAN No. 239/ IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan pedoman penyusunan PeLaporan Kinerja, Kinerja Kecamatan Pantai Cermin diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran Program/ kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian kinerja Program/ kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Kinerja kegiatan yang terdiri dari input, proses, output, outcome, benefit, dan impact.

3.2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (*Input*)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. **Indikator Keluaran (*Output*)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (*Outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (*Benefit*)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (*Impact*)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

3.3. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran

Evaluasi kinerja dimulai dengan menghitung nilai capaian dan pelaksanaan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian program dan kajian serta sasaran didasarkan nilai capaian kinerja tersebut.

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 6 (enam) indikator kinerja dengan tujuan pencapaian sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian diukur menggunakan klasifikasi sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	<53%	Gagal

Sumber : Bahan ajar Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat

3.4. Hasil pengukuran perjanjian kinerja organisasi tahun 2019

Tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Pantai Cermin untuk Tahun 2019 berdasarkan sasaran diukur menurut target dan realisasi pencapaian dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO	Kinerja						
	Sasaran	Program	Indikator Kegiatan/Output/Keluaran	Satuan	Target	Realisasi	(%)
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	3,14	28,51	90,79
		Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
		Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase gangguan Trantibmas yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
2.	Meningkatnya kepatuhan Nagari dalam penataan administrasi	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari	Persentase Nagari dengan Pelaporan ADN tepat waktu	%	100	100	100
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari	Persentase Nagari yang menetapkan APB tepat waktu	%	100	100	100
3	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	Persentase usulan Musrembang Kecamatan yang tertampung dalam Dokumen RKPD	%	100	63,63	63%
		-	Persentase capaian PAD	%	100	16,43	16,43 %

Realisasi indikator kinerja dihitung menggunakan formula/rumus sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dihitung melalui pendekatan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Nilai IKM didapatkan dari hasil kegiatan survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bag.Organisasi dan RB Setda Kab.Solok pada Tahun 2019.

Hasil survey ini diperoleh dari jumlah populasi (orang) yang mendapatkan pelayanan di Kecamatan Pantai Cermin diperoleh rata-rata sampel (jumlah kuisioner) sebanyak 50 (orang), nilai rata-rata unsur pelayanan sebagai berikut :

Tabel : Nilai SKM Setelah Dikonversikan Berdasarkan Unsur Pelayanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok

No.	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	NRR Per Unsur	Nilai IKM Dikonversikan	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3,41	0,37	85,19	B
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,44	0,34	85,94	B
U3	Waktu Penyelesaian	3,65	0,32	91,23	A
U4	Biaya/Tarif	3,95	0,44	98,87	A
U5	Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,50	0,35	87,45	B
U6	Kompetensi Pelaksana	3,39	0,34	84,72	B
U7	Perilaku Pelaksana	3,38	0,36	84,62	B
U8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,38	0,34	84,62	B
U9	Sarana dan Prasarana	3,62	0,39	90,19	A
	Total Nilai	3,52	0,36	88,09	B

1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	%pencapaian
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,5	3,52	100,57

Dari tabel di atas nilai rata-rata IKM Kecamatan Pantai Cermin masih perlu ditingkatkan di masa mendatang hal ini disebabkan nilai rata-rata per unsur bernilai "B"(Pelayanan Baik) yang diharapkan pada tahun mendatang semua unsur bernilai "A", sehingga rata-rata IKM dapat meningkat.

1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan beberapa Tahun Terakhir

No	Indicator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	IKM	-	3,14	3,5	-	28,51	3,52	-	90,79	100,57

1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Pada Tahun 2019 telah berhasil dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dan diperoleh hasil yang baik (B) hal ini berarti masyarakat sudah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kec.Pantai Cermin. Pada tahun sebelumnya tahun 2018 telah dilakukan survey IKM dengan demikian bisa dibandingkan peningkatan/penurunannya. Diharapkan pada tahun 2020 survey IKM tetap dilakukan agar menjadi motivasi bagi SKPD dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penyebab keberhasilan capaian IKU adalah kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas masing-masing serta kersama yang baik.

1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pantai Cermin menurun dibandingkan tahun sebelumnya hal ini diakibatkan oleh kebijakan daerah. Tapi hal ini tidak membuat penurunan terhadap kinerja dalam pelayanan terhadap masyarakat.

1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	IKU	Program/Kegiatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Adm Perkantoran : <i>Kegiatan</i> ; <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Alat tulis Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Makanan dan Minuman • Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah • Penyediaan Jasa Pendukung Adm keamanan Teknis Perkantoran • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : <i>Kegiatan</i> ; <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional • Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : <i>Kegiatan</i> ; <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal : <i>Kegiatan</i> ; <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam

		Tekhnik Pencegahan Kejahatan
--	--	------------------------------

1.6 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk Tahun mendatang akan lebih ditingkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat melalui peningkatan pemahaman aparatur pelayanan dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang serta memberikan informasi melalui sosialisasi pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pantai Cermin sehingga masyarakat dapat merasa puas terhadap pelayanan yang cepat, efisien, transparan, dan memuaskan.

2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Nilai Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Tahun 2019 sebesar 100% diperoleh dari Jumlah (0) pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan masyarakat (0) dikali 100%. Pada Tahun 2019 tidak ada pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Kecamatan Pantai Cermin.

2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	%pencapaian
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100

2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	100	100	-	100	100	-	100	100

Karena IKU ini baru direvisi, jadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak didapatkan data tersebut, sehingga capaian pada Tahun 2019 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Untuk indikator ini belum bisa melakukan penilaian, keberhasilannya ataupun kegagalannya, demikian juga dengan peningkatan maupun penurunannya karena data tahun sebelumnya tidak ada. Diharapkan pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya hasil yang didapatkan tetap memuaskan.

2.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pantai Cermin menurun dibandingkan tahun sebelumnya hal ini diakibatkan oleh kebijakan daerah. Tapi hal ini tidak membuat penurunan terhadap kinerja dalam upaya menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang ada di Kecamatan Pantai Cermin.

2.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	IKU	Program/Kegiatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Adm Perkantoran : <i>Kegiatan</i> ; <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Alat tulis Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Makanan dan Minuman • Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah • Penyediaan Jasa Pendukung Adm keamanan Teknis Perkantoran • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : <i>Kegiatan</i> ; <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional • Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : <i>Kegiatan</i> ; <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal : <i>Kegiatan</i> ; <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

2.6 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk Tahun mendatang akan lebih ditingkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masalah yang ada pada masyarakat Kecamatan Pantai Cermin.

3. Persentase gangguan Trantibmas yang ditindaklanjuti

Hasil yang didapatkan adalah sebesar 100 %, yang didapatkan dari jumlah gangguan yang ditindaklanjuti Kecamatan Pantai Cermin (21 kejadian) dibandingkan dengan gangguan yang terjadi selama Tahun 2019 (21 kejadian) sebagai berikut :

No	Jumlah gangguan/laporan	Yg telah selesai	Lanjut ke ket	ket
1	21	15	6	Semuanya ditindaklanjuti

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	%pencapaian
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase gangguan Trantibmas yang ditindaklanjuti	100%	100%	100

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan beberapa Tahun Terakhir

No	Indicator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	Persentase gangguan trantibmas yang ditindaklanjuti		100	100		100%	100%		100%	100%

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) presentase gangguan trantibmas yang ditindaklanjuti tetap stabil/baik dari tahun ke tahun.

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan persentase gangguan trantibmas yang ditindaklanjuti :

- Baiknya koordinasi Kecamatan Pantai Cermin dengan Muspika di Kec.Pantai Cermin dalam menangani setiap kejadian/masalah trantibmas yang terjadi di Kecamatan Pantai Cermin.
- Cepat tanggap dan sigap dalam menanggulangi setiap kejadian/masalah trantibmas yang terjadi di Kecamatan Pantai Cermin
- Adanya anggaran yang mendukung untuk kegiatan ini berupa penggantian transport untuk Muspika dan tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi.

3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pantai Cermin menurun dibandingkan tahun sebelumnya hal ini diakibatkan oleh kebijakan daerah. Tapi hal ini tidak membuat penurunan terhadap kinerja dalam upaya penanggulan gangguan trantibmas di Kecamatan Pantai Cermin.

3.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	IKU	Program/Kegiatan
1	Persentase gangguan trantibmas yang ditindaklanjuti	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal : <i>Kegiatan</i> ; <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Pada Tahun 2019, Program/Kegiatan ini menunjang keberhasilan dalam pencapaian IKU persentase gangguan trantibmas yang ditindaklanjuti di Kec.Pantai Cermin.

3.6 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk Tahun selanjutnya diharapkan program/kegiatan ini tetap ada dan dianggarkan dengan jumlah pendanaan yang lebih baik, sehingga apapun kejadian gangguan trantibmas yang terjadi di Kecamatan Pantai Cermin dapat tertatasi.

Sasaran 2 : Meningkatnya kepatuhan Nagari dalam penataan administrasi

Sasaran Meningkatnya kepatuhan Nagari dalam penataan administrasi, dihitung melalui pendekatan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Nagari dengan Pelaporan ADN tepat waktu

Pelaporan ADN Tahun Anggaran 2019 oleh Wali Nagari, paling lambat adalah 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk kedua nagari di Kecamatan Pantai Cermin mengirimkan laporan ADN nya sebagai berikut :

- Nagari Surian melaporkan ADN pada Desember 2019
- Nagari Lolo melaporkan AND pada Desember 2019
- Hasil IKU ini 100 % yang didapatkan dari Jumlah Nagari dengan pelaporan ADN tepat waktu di Kecamatan Pantai Cermin (2 nagari) yaitu Nagari Surian dan Nagari Lolo dibagi jumlah Nagari (2 nagari) dikali 100%.

1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	%pencapaian
	Meningkatnya kepatuhan Nagari dalam penataan administrasi	Persentase Nagari dengan Pelaporan ADN tepat waktu	100%	100%	100%

1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan beberapa Tahun Terakhir

No	Indicator Kinerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	Persentase Nagari dengan Pelaporan ADN tepat waktu	-	100	100	-	100	100	-	100	100

Karena IKU ini baru dimunculkan pada Tahun 2019, maka untuk tahun-tahun sebelumnya bisa dibandingkan dengan Tahun 2019.

1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Untuk indikator ini sudah begitu baik hasilnya, karena niainya 100%, penyebab berhasilnya karena disiplin nagari dalam menyampaikan laporan TA. 2019 dan pengawasan dari Kecamatan. Diharapkan pada tahun 2020 dan tahun berikutnya indikator kinerja ini akan lebih baik lagi

1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pantai Cermin menurun dibandingkan tahun sebelumnya hal ini diakibatkan oleh kebijakan daerah. Sehingga hal ini membuat penurunan terhadap kinerja dalam upaya peningkatan kepatuhan nagari dalam penataan administrasi di Kecamatan Pantai Cermin.

1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	IKU	Program/Kegiatan
	Persentase Nagari dengan Pelaporan ADN tepat waktu	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari : <i>Kegiatan ;</i> • Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.6 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk Tahun mendatang akan lebih ditingkatkan dalam monitoring dan evaluasi ADN terhadap nagari-nagari di Kecamatan Pantai Cermin sehingga nagari dapat melaporkan ADN nya tepat waktu dan kualitas laporannya juga dapat meningkat lebih baik lagi.

2. Persentase Nagari yang menetapkan APB tepat waktu

Untuk Penetapan APB Nagari Tahun 2019, seharusnya ditetapkan sebelum 31 Desember 2018, namun kedua nagari menetapkan APB TA. 2019 pada awal Tahun 2019 yaitu pada Bulan Januari 2019, sehingga hasil penilaian IKU ini 100 % yang didapatkan dari Jumlah Nagari yang menetapkan APB tepat waktu di Kecamatan

Pantai Cermin (2 nagari) ; Nagari Surian dan Nagari Lolo dibagi jumlah Nagari (2 nagari) dikali 100%.

2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	%pencapaian
	Meningkatnya kepatuhan Nagari dalam penataan administrasi	Persentase Nagari yang menetapkan APB tepat waktu	100%	100%	100 %

2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	Persentase Nagari yang menetapkan APB tepat waktu	-	100	100		100	100	-	100	100

Karena IKU ini baru dimunculkan pada Tahun 2018, maka untuk tahun-tahun sebelumnya bisa dibandingkan dengan Tahun 2019.

2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Untuk indikator ini mendapatkan nilai karena hasilnya 100%. Keberhasilan ini disebabkan karena nagari sudah disiplin dalam menetapkan APB nya dan dari pihak Kecamatan memberika teguran yang cukup tegas terhadap nagari, sehingga nagari tidak melalaikan hal tersebut. Diharapkan pada tahun 2019 dan tahun berikutnya indikator kinerja ini tetap tercapai 100%, dengan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik lagi dari pihak Kecamatan dan dari Nagari pun bisa memperbaiki diri dengan lebih disiplin.

2.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pantai Cermin menurun dibandingkan tahun sebelumnya hal ini diakibatkan oleh kebijakan daerah. Sehingga hal ini cukup berpengaruh terhadap kinerja dalam upaya nagari menetapkan APB tepat waktu di Kecamatan Pantai Cermin karena keterbatasan dana untuk turun kelapangan.

2.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	IKU	Program/Kegiatan
	Persentase Nagari yang menetapkan APB tepat waktu	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari : <i>Kegiatan ;</i> <ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2.6 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk Tahun mendatang akan lebih ditingkatkan koordinasi terhadap nagari-nagari di Kecamatan Pantai Cermin sehingga nagari dapat menetapkan APB-nya tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pada nagari masing-masing.

Sasaran 3 : Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Sasaran Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dihitung melalui pendekatan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam Dokumen RKPD

Hasil IKU ini 63 % yang didapatkan Jumlah usulan yang tertampung dalam Dokumen RKPD dibagi jumlah usulan dalam Musrenbang Kecamatan dikali 100%, untuk Tahun 2019 berdasarkan data dari Barenlitbang Kab.Solok ada sekitar 42 usulan masyarakat yang tertampung dalam dokumen RKPD dari total 66 usulan dari Kecamatan Pantai Cermin yang berarti 63,63 %.

1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	%pencapaian
	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam Dokumen RKPD	100	63,63	63%

1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan beberapa Tahun Terakhir

No	Indicator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam Dokumen RKPD	-	100	100	-	35	63,63	-	35 %	63%

Realisasi kinerja dan pencapaian kinerja tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami kenaikan \pm 28 %. Penyebab usulan tidak masuk 100% disebabkan oleh :

1. Karena keterbatasan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
2. Jumlah anggaran yang akan dibagi tidak seimbang dengan SKPD dan Nagari yang akan menerima .

2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Untuk indikator ini belum bisa melakukan penilaian, keberhasilannya ataupun kegagalannya, demikian juga dengan peningkatan maupun penurunannya karena data tahun sbelumnya tidak ada. Diharapkan pada tahun 2019 dan tahun berikutnya barenlitbang menyediakan data tersebut.

2.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pantai Cermin menurun dibandingkan tahun sebelumnya hal ini diakibatkan oleh kebijakan daerah. Tapi hal ini tidak membuat penurunan terhadap kinerja dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan (Musrenbang).

2.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	IKU	Program/Kegiatan
	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam Dokumen RKPD	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari : <i>Kegiatan</i> ; <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

2.6 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk Tahun mendatang akan lebih ditingkatkan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (musrenbang) yang lebih tepat waktu dalam pelaksanaan dan dapat menghadirkan seluruh stakeholder yang terlibat.

2. Persentase capaian PAD

Pencapaian IKU Ini 16,43 %, yang didapatkan dari hasil penerimaan retribusi IMB Kec.Pantai Cermin pada tahun 2019 dibandingkan dengan target PAD Tahun 2019 yaitu : target Rp.20.530.000 (100%), dengan realisasi Rp.3.375.000. (16,43%).

2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	%pencapaian
	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase capaian PAD	100% (Rp20.530.000)	16,43 (3.375.000)	16,43%

2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2017 dan beberapa Tahun Terakhir

No	Indicator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2016	2017	2019	2017	2018	2019
	Persentase capaian PAD	100% (Rp. 7.400.000)	80% (Rp. 1.400.000)	100% (Rp.3.400.000)	83,3% 7.400.000	66% 1.400.000	174% 3.400.000)	37	47,13	16,43

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) presentase capaian PAD sudah baik dari tahun sebelumnya disebabkan sudah mulai tingginya kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB karena sudah mendapat sosialisasi tentang pentingnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan.

1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Analisis penyebab kurang berhasilnya atau penurunan pencapaian target PAD :

1. Perlu dilakukan evaluasi target PAD yang ditetapkan di Kecamatan Pantai Cermin dengan perbandingan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang mendekati hampir sama, dengan taget PAD Kecamatan Danau Kembar Rp. 5.000.000, Kecamatan Hiliran Gumanti Rp.7.500.000 serta Kecamatan Junjung Sirih Rp. 10.500.000
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB
3. Dengan adanya peningkatan status jalan lintas yang berada di Kecamatan Pantai Cermin menjadi jalan Nasional, adanya keraguan bagi kami untuk memungut IMB bagi masyarakat yang mendirikan bangunan dengan jarak 27 Meter dari As Jalan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012

1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pantai Cermin menurun dibandingkan tahun sebelumnya hal ini diakibatkan oleh kebijakan daerah. Tapi hal ini tidak membuat penurunan terhadap kinerja dalam upaya pencapaian target PAD Kecamatan Pantai Cermin.

1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	IKU	Program/Kegiatan
	Persentase pencapaian target PAD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : <i>Kegiatan ;</i> <ul style="list-style-type: none">• Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari. <i>Kegiatan ;</i> <ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Pada Tahun 2019, Program/Kegiatan yang seharusnya menunjang keberhasilan ini tidak muncul di DPA Tahun 2019, yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga untuk penunjang kegiatan dilapangan bersumber dari kegiatan rutin yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan pada DPA Perubahan 2019 dibebankan kepada kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.

1.6 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk Tahun selanjutnya diharapkan program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian target PAD tidak dihilangkan dari DPA, sehingga indikator kinerja ini dapat tercapai dengan baik. Walaupun terbukti, tanpa adanya dana pada kegiatan ini, Kecamatan Pantai Cermin tetap dapat mencapai melbihi target PAD yang telah ditetapkan (174%).

1.5 Realisasi Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program-program dan

kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

Akuntabilitas keuangan Tahun 2019 pada Kantor Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

Table 3.5
AKUNTABILITAS KEUANGAN

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	9.000.000	7.000.000	7.000.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	174.280.140	201.860.140	129.560.140	168.254.029	196.238.045	106.389.677
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	81.600.000	80.220.000	81.120.000	81.220.000	80.220.000	81.120.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Meningkatkan administrasi Nagari	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari	335.306.250	158.350.000	212.750.000	333.099.000	152.550.000	211.660.000
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari	12.000.000	6.500.000	6.500.000	11.986.000	6.500.000	6.500.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	7.000.000	1.400.000	3.400.000	7.000.000	1.400.000	3.400.000

Dalam menjalankan Program dan Kegiatan Kecamatan Pantai Cermin tersedia anggaran belanja dan realisasinya pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja	809.860.675	802.441.430	99,08
	Belanja Tidak Langsung			
	- Belanja Pegawai	403.200.000	295.829.312	73,37
	Belanja Langsung	412.810.675	411.982.236	99,80
	- Belanja Pegawai	43.200.000	43.200.000	100
	- Belanja Barang dan Jasa	351.980.140	342.533.045	99,32
	- Belanja Modal	65.350.000	63.325.000	96,98

Untuk lebih jelasnya penyerapan anggaran di Kecamatan Pantai Cermin Tahun Anggaran 2019, maka dapat dilihat pada realisasi belanja masing-masing program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Realisasi Belanja Program dan Kegiatan
Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	129.560.140	106.389.677	82,11
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000	100
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	15.230.140	11.292.969	74,14
	c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	1.500.000	1.009.400	67,29
	d. Penyediaan alat tulis kantor	9.830.000	9.830.000	100
	e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.900.000	3.900.000	100
	f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000	2.000.000	100
	g. Penyediaan peralatan dan	14.000.000	14.000.000	100

	<ul style="list-style-type: none"> perengkapan kantor h. Penyediaan makanan dan minuman i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 	<p>16.800.000</p> <p>25.000.000</p> <p>41.000.000</p>	<p>13.550.000</p> <p>9.512.000</p> <p>40.995.000</p>	<p>80,65</p> <p>38,04</p> <p>99,98</p>
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 	<p>81.120.000</p> <p>29.400.000</p> <p>49.220.000</p> <p>2.500.000</p>	<p>81.120.000</p> <p>29.400.000</p> <p>49.220.000</p> <p>2.500.000</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja/keuangan 	<p>200.000</p>	<p>200.000</p>	<p>100</p>
4.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 	<p>158.350.000</p> <p>212.750.000</p>	<p>152.550.000</p> <p>211.660.000</p>	<p>99,48</p> <p>99,48</p>
5.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Nagari 	<p>6.500.000</p>	<p>6.500.000</p>	<p>100</p>
6.	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat 	<p>5.000.000</p>	<p>5.000.000</p>	<p>100</p>
8.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 	<p>7.000.000</p>	<p>7.000.000</p>	<p>100</p>

Kecamatan Pantai Cermin dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dan efektif dalam melakukan kegiatannya. Efisien dan Efektifitas diperoleh dari perbandingan antara realisasi Output dengan Realisasi Input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan.

Suatu kegiatan tersebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan inefisien dan Efektifitas disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2019, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 7 (tujuh) program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran tahun 2019
2. Dari hasil evaluasi kinerja pada Kecamatan Pantai Cermin selama tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil dengan baik.
3. Dalam segi target pendapatan daerah (retribusi IMB), kecamatan Pantai Cermin dapat merealisasikannya sebesar 174% dari target yang ditetapkan. Tingginya pencapaian target tersebut disebabkan oleh :
 - ✓ Sudah mulai tingginya kesadaran Masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan.
 - ✓ Masyarakat sudah mendapatkan sosialisasi akan manfaat pengurusan IMB
4. Dalam perealisasi anggaran Kecamatan Pantai Cermin Tahun Anggaran 2019 kecamatan Pantai Cermin telah dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp. 802.441.430,- (99,08%) dari anggaran belanja langsung yang telah ditetapkan.

4.2 SARAN

Demi terwujudnya Good Government, dalam mewujudkan kesatuan dalam tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan (akuntabilitas), hendaknya dilakukan :

1. Peningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
3. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan;
5. Pembinaan pengelolaan keuangan, pembangunan perencanaan, dan pelaporan oleh dinas terkait.